



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Perangkat Segel Kantor Desa

**Enam Bulan
Gaji Nunggak**

NAPAL PUTIH - Perangkat Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih yang dipimpin Sekretaris Desa, Kustori menutup kantor desa, kemarin (30/9). Bahkan mereka menghentikan seluruh pelayanan yang terkait dengan perangkat atau kantor desa tersebut.

Selain itu menyurati Pemkab BU, mereka juga menyurati kepala desa dan menyatakan bahwa kantor desa ditutup terhitung Kamis (30/9) hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini mereka lakukan lantaran gaji perangkat desa yang belum dibayar

selama enam bulan, April - September 2021.

Kustori mengatakan bahkan ada perangkat desa yang belum dibayar sejak Januari lalu. Sedangkan mereka menilai tugas perangkat desa sangat berat karena harus selalu berada di kantor desa melaksanakan seluruh kegiatan dan pelayanan masyarakat.

"Sedangkan kami dan perangkat desa sudah terus menagih honor atau siltap yang menjadi hak kami. Namun tak kunjung ada kejelasan," katanya.

Karena tak kunjung ada kejelasan, kemarin mereka mereka memutuskan untuk menutup sementara kantor desa dan menghentikan seluruh

pelayanan. Kantor dan pelayanan akan kembali dibuka jika honor mereka dibayar. "Nanti kalau sudah dibayarkan semuanya, baru kita buka. Karena Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dicairkan," ujarnya.

Ia juga kemarin mengkonfirmasi pada kepala desa terkait gaji mereka. Kepala desa mengaku belum bisa membayarkan gaji karena adanya pekerjaan DD yang belum disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). "Sedangkan itu bukan salah kami. Makanya kami tidak bisa menerima dan menutup semua kantor desa," tegas Kustori.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) BU, Ir. Budi Sampurno menu-

turkan mereka akan mengecek permasalahan yang terjadi Desa Muara Santan. Termasuk apa yang membuat kepala desa belum bisa membayarkan honor perangkat desa.

"Kita akan cek dulu apa yang menjadi permasalahan. Apakah hanya perangkat desa atau termasuk honor kepala desa, karena syarat pencairannya sama," terangnya.

Budi menerangkan penutupan kantor desa tidak boleh berlangsung lama. Ia meminta seluruh pelayanan pada masyarakat harus tetap berjalan sehingga tidak merugikan masyarakat. "Penutupan dan penghentian pelayanan tidak boleh terjadi. Kita pastikan akan tetap selesai," ujarnya. (qia)